



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO LANTAI 1
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW. 5200, 5201, (021) 3450959, FAKSIMILE (021) 3454640, 3846402
SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S- **7389** /PB.1/2017
Sifat : **Segera**
Lampiran : -
Hal : Usulan IKU Tambahan KPPN Terkait Pelaksanaan
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

24 Agustus 2017

Yth. 1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
2. Para Kepala KPPN

Sehubungan surat Kepala KPPN Sukabumi Nomor S-1091/WPB.13/KP.128.10/2017 tanggal 3 Juli 2017 hal Usulan IKU Tambahan KPPN Sukabumi, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Terhadap usulan 2 (dua) IKU tambahan Kemenkeu-Four KPPN Sukabumi terkait pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, telah dilakukan reviu sebagai berikut:
 - a. Kegiatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai dasar pengusulan IKU tambahan tersebut baru diimplementasikan oleh seluruh KPPN pada April 2017, dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - b. Sampai dengan saat ini, *Standard Operating Procedures* (SOP) penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, yang diperlukan sebagai landasan penetapan penanggung jawab IKU dimaksud dalam Manual IKU, masih dalam tahap finalisasi.
 - c. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi perhitungan Kualitas Kontrak Kinerja (K3) Kemenkeu, pelaksanaan *addendum* Kontrak Kinerja tahun 2017 dapat mempengaruhi hasil perhitungan K3 pejabat/pegawai tahun 2017, sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja pejabat/pegawai.
2. Memperhatikan hasil reviu di atas, usulan IKU tambahan KPPN terkait pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa akan menjadi salah satu masukan dalam *refinement* IKU Kanwil DJPB dan KPPN pada tahun 2018.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Ditjen,



Haryana

NIP. 1960060319850210012

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Pelaksanaan Anggaran

